

PENGEMBANGAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) BANGUNTAPAN SEBAGAI MODEL

Sujono

ABSTRACT

This study aims to determine the agricultural extension program facilitation, agricultural extension facilitation, facilitation of information, the main institutional actors and businessmen, human resources and Agricultural Extension Workers (PPL, Penyuluh Pertanian Lapangan) facilities in Banguntapan Institution of Agricultural Extension (BPP, Balai Penyuluhan Pertanian) as a model. The method used are observation, interview and questionnaire. The results showed that the Agricultural Extension Center as a model to be supported in their program in Banguntapan were: counseling, counseling facilities, information facilities, institutional, PPL resources, and supporting devices facilities. The Banguntapan Institution of Agricultural Extension still requires necessary improvement to become the Model for Extension, the same applied for The quality of human resources, THL, and self-help. The Institution's infrastructure still needed improvement and its readiness as a model needs support from its apparatus. Financial support for the EMB Banguntapan was prerequisite as the model is still lacking for the operational management and operational of BPP. Improvement was needed in terms of the quality of Extension human resources, through training and collaborating with other relevant institutions. It should be proposed to the local government as necessities for the development of BPP's extension activities and management.

Keywords: *BPP, development, facilitation*

PENDAHULUAN

Amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K), Pasal 8 ayat (2) huruf d dan Pasal 15 memberi makna bahwa Balai Penyuluhan di tingkat kecamatan atau Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan pertanian dalam arti luas. Balai Penyuluhan sebagai tempat satuan administrasi pangkal (satminkal) bagi penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan ini berperan mengkoordinasikan, mensinergikan dan menyelaraskan kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan di wilayah kerja balai.

Dengan kelembagaan penyuluhan yang kuat di daerah dukungan, pengawalan dan sinergi program-program pembangunan pertanian, perikanan, dan

kehutanan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Salah satu program pembangunan yang memerlukan peran optimal dari kelembagaan penyuluhan di daerah adalah 4 (empat) sukses Program Pembangunan Pertanian yaitu: (1) Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan, (2) Diversifikasi Pangan, (3) Peningkatan Nilai Tambah dan Ekspor dan (4) Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Balai Penyuluhan di kecamatan dengan peran strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sampai saat ini belum optimal. Salah satunya adalah belum optimalnya dukungan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemenuhan sarana dan prasarana serta pembiayaan. Penyebabnya disamping keterbatasan biaya juga adanya kesenjangan persepsi tentang peran dan keberadaan Balai Penyuluhan.

Kecamatan banguntapan sebagai salah satu kecamatan yang berada di wilayah kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan potensi yang dipunyai sangat memungkinkan menjadi Balai Penyuluhan Pertanian Model dengan syarat adanya pengembangan dan memenuhi standar ideal bagi keberadaan sebuah BPP.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian adalah

- a. Sejauh manakah balai Penyuluhan Pertanian Banguntapan dapat digunakan sebagai model berkaitan program penyuluhan pertanian, fasilitasi penyuluhan pertanian, fasilitasi informasi, kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, dan fasilitas SDM PPL.
- b. Bagaimanakah keadaan Sumber Daya manusia balai penyuluhan Pertanian Banguntapan
- c. Bagaimanakah sarana dan Prasarana Balai Penyuluhan Pertanian
- d. Bagaimanakah ketersediaan dana Balai Penyuluhan Pertanian

METODE PENELITIAN

Metode dasar yang digunakan adalah observasi, wawancara dan kuisioner. Daerah penelitian adalah kecamatan Banguntapan kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta. Populasi adalah para penyuluh yang ada di BPP dan petani yang ada di wilayah Banguntapan. Adapun penelitian ini bersifat penggalian data yang ada di BPP yang selanjutnya dibandingkan dengan BPP yang ideal.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Identifikasi potensi wilayah yang meliputi: sumber daya alam, sumber daya

buatan, dan sumber daya manusia dan pemanfaatan potensi yang tersedia.

- 2) Inventarisasi perkembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha.
- 3) Inventarisasi masalah yang meliputi: masalah perilaku dan masalah non perilaku yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha.
- 4) Menyusun skala prioritas pengembangan usaha yang meliputi : usaha kecil dan usaha menengah.
- 5) Pemetaan komoditas usaha agribisnis unggulan dalam wilayah BP3K.
- 6) Menyusun rencana kebutuhan administrasi, sarana dan prasarana balai.

Kegiatan tersebut mengacu pada Tugas Balai penyuluhan pertanian adalah

- 1) Menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten/kota;
- 2) Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
- 3) Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
- 4) Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- 5) Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- 6) Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian di BPP Banguntapan

dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian yaitu berkaitan program penyuluhan pertanian, fasilitasi penyuluhan pertanian, fasilitasi informasi, kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, dan fasilitas SDM PPL. Hasil-hasil tersebut disajikan secara rinci seperti dibawah ini:

1. Program Penyuluhan Pertanian

Program Penyuluhan di kecamatan adalah kesepakatan antara penyuluh PNS dengan penyuluh swadaya dan penyuluh swasta di wilayah kerja Balai Penyuluhan untuk melaksanakan penyuluhan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Penyusunan program penyuluhan di kecamatan dilakukan melalui proses tahapan sebagai berikut Identifikasi permasalahan berkaitan dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha baik bersifat perilaku maupun non perilaku untuk keperluan penyusunan RDK dan RDKK. Kegiatan identifikasi dapat menggunakan pendekatan PRA/kaji tindak yang pelaksanaannya dilakukan oleh tim penyuluh bersama-sama dengan pelaku utama dan pelaku usaha. Hasil identifikasi permasalahan menjadi bahan utama

pembahasan pada pertemuan antara pejabat pemerintah (pimpinan instansi kabupaten terkait dan kecamatan) dengan perwakilan pelaku utama dan pelaku usaha (pertemuan ini dikenal dengan nama mimbar sarasehan). Hasil mimbar sarasehan berupa kesepakatan tentang pelaksanaan program pemerintah dan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha. Kesepakatan tersebut menjadi acuan dalam penyusunan program penyuluhan pertanian.

Program Penyuluhan di Kecamatan disusun bersama-sama antara penyuluh dengan wakil pelaku utama dan pelaku usaha. Program Penyuluhan di Kecamatan disyahkan dan dituangkan pada Berita Acara oleh Pimpinan Balai yang disaksikan oleh para penyuluh dan wakil pelaku utama dan pelaku usaha. Pengesahan program dilaksanakan pada bulan Oktober pada tahun berjalan untuk program penyuluhan tahun berikutnya. Format dan penyusunan program mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian No.25/Permentan/OT/140/5/2009 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian.

Tabel1. Program Penyuluhan Pertanian di BPP Banguntapan

Program Penyuluhan Pertanian	Selalu	Kadang-kadang	Tidak pernah
Merumuskan dan menyusun program penyuluhan	8	0	0
Menyediakan dan menyebarkan informasi	7	1	0
Upaya memberdayakan dan memperkuat kelembagaan	8	0	0
Dukungan sarana penyuluhan	7	1	0
Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan model usaha tani	4	4	0
Melaksanakan demonstrasi	4	4	0
jumlah	38	10	0
persentase	79.17	20.83	

Sumber: Analisis data primer BPP Banguntapan

Dari tabel 1. tersebut menjelaskan bahwa program penyuluhan di BPP Banguntapan 100% selalu membuat. Program merupakan pedoman yang harus disusun setiap tahun sebagai acuan dalam kegiatan penyuluhan. Hal ini jelas bahwa penyuluh memiliki tanggung jawab membuat program lebih besar. Demikian pula memperdayakan dan memperkuat kelembagaan mempunyai nilai 100%, yang berarti sepenuhnya dilakukan oleh penyuluh. Penyuluhan melalui percontohan bagi penyuluh ada kesulitan tersendiri berkaitan dengan lahan dan biaya.

Merumuskan dan menyusun program penyuluhan kecamatan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan agroekosistem dalam rangka dukungan pelaksanaan program pemerintah dan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan kecamatan secara berdayaguna dan berhasilguna. Menyediakan dan menyebarkan informasi yang diperlukan oleh pelaku utama dan pelaku usaha secara cepat dan tepat sasaran. Memberdayakan dan memperkuat kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha agar mampu berperan sebagai bagian sistem agribisnis di wilayah kerja balai. Meningkatkan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta agar dapat membimbing, mendampingi, melayani pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengembangkan usaha mereka. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan model usahatani bagi pelaku utama dan pelaku usaha secara berdayaguna dan berhasilguna.

Pedoman Pengembangan dan

Pengelolaan Balai Penyuluhan ini ditujukan bagi para penyelenggara dan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang terdiri dari: pejabat struktural dan fungsional penyuluh di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.

2. Fasilitasi Penyuluhan Pertanian

Pelaksanaan penyuluhan dilakukan dengan menggunakan berbagai metoda diantaranya kunjungan lapangan atau anjungsana, latihan/kursus, sekolah lapangan, studi banding, percontohan, demonstrasi, dll. Sebelum pelaksanaan penyuluhan setiap penyuluh diharuskan menyusun rencana/jadwal pelaksanaan penyuluhan; menyiapkan materi dan metoda penyuluhan yang akan digunakan; menyiapkan sarana dan alat bantu yang diperlukan. Selama proses pelaksanaan penyuluhan sebaiknya mendapat pengawalan atau supervisi oleh penyuluh supervisor dari balai. Pada akhir pelaksanaan penyuluhan setiap penyuluh harus menyusun laporan tertulis dan disampaikan kepada pimpinan balai sebagai bahan evaluasi.

Penyuluh berusaha membantu petani dalam hal kemudahan mengakses kebutuhan saprodi, permodalan dan pemasaran. Sejumlah 5 penyuluh (62,5%) selalu membantu kemudahan tersebut dan 37,5% kadang-kadang. Dilokasi penelitian system kerja penyuluh adalah kebersamaan. Pembagian tugas dilakukan sehingga dalam menjalin komunikasi dengan pihak lain (penyedia saprodi, permodalan, dan pemasaran) di lakukan secara perwakilan oleh sebagian penyuluh untuk se wilayah BPP Banguntapan. Dalam fasilitasi penyuluhan berupa penyiapan materi dan metode telah disiapkan dengan sangat baik. Hal ini sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi penyuluh yang menyiapkan diri tentang materi dan metode agar proses penyuluhan berjalan baik. Semua penyuluh memiliki rencana kegiatan penyuluhan yang di dalamnya terdapat materi dan metode yang akan disampaikan. Kegiatan supervise oleh penyuluh supervisor dilakukan sebesar 25% dalam katagori selalu dan 75% dalam katagori kadang-kadang. Hal ini menunjukkan bahwa perlu peningkatan supervise untuk membangun motivasi

dan penilaian kinerja penyuluh agar lebih baik. Adanya monitoring yang rutin akan mendorong penyuluh menyiapkan diri lebih baik tentang materi, media, metoda, alat peraga, alat bantu, dan lain-lain. Pelaksanaan di lapangan akan terpantau tentang kesesuaian antara rencana kerja dengan realisasinya. Penyelesaian laporan tepat waktu termasuk katagori yang perlu ditingkatkan karena baru mencapai 25%, yang termasuk katagori kadang-kadang sebesar 75%.

Tabel 2. Fasilitasi Penyuluhan Pertanian di BPP Banguntapan

Fasilitasi Penyuluhan Pertanian	Selalu	Kadang-kadang	Tidak pernah
Mengikhtarkan kemudahan saprodi, modal, dan pemasaran	5	3	0
Menyiapkan materi dan metode	8	0	0
Pengawasan oleh penyuluh supervisor	2	6	0
Penyelesaian laporan sebagai bahan evaluasi	2	6	0
jumlah	17	15	0
persentase	53,13	46,86	

Sumber: Analisis data primer BPP Banguntapan

Pelaksana penyuluhan adalah penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta yang merupakan penjabaran dari program penyuluhan dengan kegiatan utamanya adalah mengajarkan teknologi dan mengikhtarkan kemudahan bagi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengembangkan usaha mereka.

Ruang lingkup pengajaran teknologi meliputi: budidaya, pasca panen, pengolahan, pemasaran, kepemimpinan dan keorganisasian agribisnis. Sedangkan yang dimaksud mengikhtarkan kemudahan adalah kegiatan mengupayakan ketersediaan sarana produksi, akses permodalan dan akses pemasaran.

3. Fasilitasi Informasi Penyuluhan Pertanian

Ketersediaan informasi di Balai Penyuluhan di kecamatan sangat diperlukan dalam rangka membantu pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh para pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahatani/usaha perikanan/usaha kehutanan. Informasi yang perlu disediakan oleh Balai Penyuluhan di Kecamatan diantaranya adalah Informasi Teknologi yang berkaitan dengan teknologi budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran serta manajemen usahatani/usaha perikanan/usaha kehutanan. Informasi Sarana Produksi terutama menyangkut ketersediaan, keberadaan, jumlah dan mutu, bibit/benih, pupuk, obat-obatan, modal usaha, alat dan mesin pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Informasi pembiayaan terutama menyangkut satuan biaya untuk melaksanakan suatu usaha agribisnis baik budidaya, panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran. Informasi Pasar diantaranya harga komoditi, permintaan komoditi (jumlah, mutu, kapan diperlukan pembeli/konsumen), sumber produksi. Informasi Kebijakan seperti pengaturan pola produksi, penggunaan produk sarana produksi/teknologi/sumberdaya air, pasar,

lingkungan hidup, kelestarian sumberdaya alam, dll. Untuk menyiapkan informasi yang diperlukan, Balai Penyuluhan di Kecamatan melakukan pengumpulan data dan informasi. Data dan informasi yang terkumpul selanjutnya diolah dan dikemas sesuai dengan fungsi kemasan dan sasaran informasi. Hasil penelitian tentang fasilitasi informasi penyuluhan disajikan seperti tabel 3.

Tabel 3. Fasilitasi Informasi Penyuluhan Pertanian di BPP Banguntapan

Fasilitasi Informasi	Selalu	Kadang-kadang	Tidak pernah
Ketersediaan informasi di BPP	5	3	0
Informasi sarana produksi	4	4	
Informasi pembiayaan	4	4	0
Informasi pasar	2	6	0
Informasi kebijakan	5	3	0
Konsultasi dengan instansi terkait	3	5	0
Jumlah	23	25	0
Persentase	47,92	52,08	

Sumber: Analisis data primer BPP Banguntapan

Ketersediaan informasi secara umum di BPP selalu ada sebesar 62,50% dan kadang-kadang ada sebesar 37,50%. Tidak ada ketersediaan informasi di BPP 0%. Hal ini menggambarkan di BPP sudah memadai ketersediaan informasi bagi pengguna sehingga menimbulkan motivasi petani bila memerlukan informasi kepada BPP sebagai salah satu sumbernya. Informasi-informasi tersebut dapat berupa sarana produksi, pembiayaan, pasar, dan kebijakan. Di BPP dapat pula berkonsultasi lembaga atau instansi yang memiliki informasi berkaitan dengan kebutuhan petani. Secara keseluruhan informasi yang selalu ada sebesar 47,92 % dan kadang-kadang ada sebesar 52,08.

Perlu dilakukan pengembangan jaringan komunikasi dengan pihak lain melalui internet dan komunikasi langsung kepada sumber, untuk memenuhi kebutuhan petani. Bila BPP memiliki data yang lengkap diharapkan menjadi sumber informasi utama petani.

4. Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha

Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan membangun sistem dan usaha agribisnis di suatu wilayah. Sistem dan usaha agribisnis dapat tumbuh dan berkembang dengan baik apabila

kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha kuat. Hasil penelitian tentang Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha disajikan seperti tabel 4.

Tabel 4. Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha di BPP Banguntapan

Kelembagaan Pelaku Utama Dan Pelaku Usaha	Selalu	Kadang-kadang	Tidak pernah
Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan	6	2	0
Pengembangan system agribisnis	2	6	0
Identifikasi pelaku usaha utama dan pelaku usaha wilayah	4	4	0
Pemetaan kondisi riil kelembagaan yg ada	2	6	0
Pengembangan jaringan kemitraan	5	3	0
Jumlah	19	21	0
Persentase	47,5	52,5	

Sumber: Analisis data primer BPP Banguntapan

Di tingkat lapangan perlu dilakukan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan petani. Penguatan dalam pengembangan system agribisnis, pendataan atau identifikasi pelaku usaha utama dan kondisi riil kelembagaan yang ada serta pengembangan jaringan kemitraan adalah penting. Di BPP Banguntapan kegiatan tersebut selalu dilakukan dengan nilai sebesar 47,50% dan kadang-kadang dilakukan sebesar 52,50%. Hal ini menunjukkan perlu dilakukan peningkatan kegiatan tersebut sebagai data utama yang akan memberikan kelengkapan data di BPP. Perlu pemberian fasilitas pendukung untuk mencapai pemenuhan data tersebut berupa internet dan perangkat lainnya. Peningkatan sumberdaya manusia penting dilakukan dengan pelatihan-pelatihan dapat kerjasama dengan lembaga lain yang memiliki kemampuan hal tersebut. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan melakukan identifikasi kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha yang ada di wilayah kerja balai. Memetakan kondisi nyata kelembagaan yang ada di wilayah kerja balai

meliputi: tingkat kemampuan manajemen, permodalan, skala usaha dan kemitraan yang dilakukan. Menyusun rencanapemberdayaan dan penguatan kelembagaan. Kegiatan pemberdayaan dan penguatan dapat berupa pelatihan, permagangan, studi banding, mengembangkan jejaring kerjasama/kemitraan, melakukan pelayanan konsultasi agribisnis, mengembangkan inkubator agribisnis.

5. Fasilitasi SDM PPL

Peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta adalah upaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap para penyuluh agar meningkat mutu pelaksanaan penyuluhan. Upaya peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta dilakukan dengan cara melakukan pendataan seluruh penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta di wilayah kerja Balai. Data yang dikumpulkan meliputi: nama penyuluh, alamat, usia, pendidikan, keahlian yang dimiliki, pelatihan/kursus yang pernah diikuti. Menginventarisasi kebutuhan materi

dalam rangka meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap para penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta. Menyusun rencana peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan

penyuluh swasta. Menyusun rencana sertifikasi keahlian/kompetensi penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta. Hasil penelitian tentang Fasilitasi SDM PPL disajikan seperti pada tabel 5.

Tabel 5. Fasilitasi SDM PPL di BPP Banguntapan

Fasilitasi SDM PPL	Selalu	Kadang-kadang	Tidak pernah
Peningkatan kapasitas PNS, PPL Swadaya, dan THL	6	2	0
Identifikasi Penyuluh	2	6	0
Inventarisasi kebutuhan materi	4	4	0
Rencana peningkatkan kualitas penyuluh	4	4	0
Rencana sertifikasi penyuluh	3	4	1
Penetapan komoditi unggulan	5	3	0
Percontohan agribisnis	1	7	0
Evaluasi penyuluh	5	3	0
Jumlah	30	33	
Persentase	47,62	52,38	

Sumber: Analisis data primer BPP Banguntapan

Peningkatan kapasitas penyuluh PNS, THL, dan swadaya selalu dilakukan sebesar 75,00% selalu ada peningkatan penyuluh, dan kadang-kadang ada peningkatan 25%. Nilai ini menggambarkan bahwa di BPP Banguntapan terdapat upaya peningkatan yang baik. Hal-hal lain yang dilakukan dengan identifikasi penyuluh, kebutuhan akan materi, adanya rencana peningkatan kualitas penyuluh, adanya komoditi unggulan, percontohan agribisnis dan evaluasi penyuluh. Semua hal tersebut perlu ditingkatkan agar kualitas SDM penyuluh lebih baik. Perencanaan sudah ada, namun dalam pelaksanaan belum dapat terlaksana secara keseluruhan karena harus ada dukungan kebijakan, anggaran, fasilitas sarana, dan lain-lain.

Percontohan agribisnis di lapangan ternyata nilai yang besar termasuk katagori kadang-kadang yaitu 87,50%. Selalu

memberikan percotohan sebesar 12,50%, hal ini masih rendah. Percontohan membutuhkan lahan, sarana produksi, tenaga, dan dukungan lain. Hal ini yang relatif kurang tersedia di BPP Banguntapan. Penyuluh yang selalu memberikan percontohan adalah dengan dukungan fasilitas, biaya, dan lain-lain yang diatur sendiri berdasarkan kemampuan penyuluh. Swadana penyuluh dilakukan agar kegiatan ini berjalan dan bekerjasama dengan petani setempat. Bagi penyuluh THL hal ini akan sulit dikerjakan karena terbatasnya anggaran yang ada. Kerjasama kemitraan yang terjalin belum memadai sehingga banyak dilakukan dengan BPTP dan STPP.

Melalui Program Revitalisasi Penyuluhan Pertanian yang diantaranya memfokuskan pada, peningkatan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian, peningkatan kuantitas dan kualitas penyuluhan

pertanian dan peningkatan kepemimpinan dan kelembagaan petani diharapkan dapat mengoptimalkan aktivitas penyuluhan pertanian. Baik penyuluhan yang difasilitasi oleh kelembagaan penyuluhan pemerintah, swasta maupun oleh petani sendiri. Harapan dari optimalnya aktivitas penyuluhan pertanian tersebut adalah dapat memfasilitasi petani dan keluarganya serta pelaku usaha pertanian lainnya untuk mewujudkan peningkatan pendapatan dan kesejahterannya. Balai Penyuluhan (BP) Model sebagai Lembaga Penyuluhan Percontohan di Tingkat Kecamatan mempunyai tanggung jawab menjamin pelaksanaan program penyuluhan pertanian berjalan terarah, terencana, terpadu dan terkendali. BP Model harus memiliki berbagai bentuk kegiatan penyuluhan yang merupakan wujud kedudukan dan peran aktif BP Model

6. Fasilitasi perangkat Pendukung Penyuluhan

Berdasarkan Peraturan Menteri Peraturan No. 51/Permentan/OT.140/12/2009 tentang Pedoman Standar Minimal dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian yang dimaksud dengan sarana dan prasarana penyuluhan adalah peralatan dan bangunan fisik yang digunakan untuk melakukan penyelenggarakan penyuluhan pertanian. Sedangkan pemanfaatan sarana prasarana adalah penggunaan peralatan dan penggunaan fisik secara optimal dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian yang efektif dan efisien.

Sarana minimal yang harus tersedia di Balai Penyuluhan meliputi sarana keinformasian, alat bantu penyuluhan, peralatan administrasi, alat transportasi,

perpustakaan, dan perlengkapan ruangan. Sedangkan untuk sarana ideal dapat dilihat pada Sarana keinformasian minimal yang harus tersedia di Balai Penyuluhan terdiri dari masing-masing. 1 (satu) unit perangkat keras komputer berupa *Computer Program Unit* (CPU), layar monitor, *keyboard*, printer, modem dan *Local Areal Network* (LAN) dan perangkat lunak yang terkait dengan pelaksanaan penyuluhan; 1 (satu) papan *display* sebagai tempat informasi penyuluhan; 1 (satu) kamera analog atau digital untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan penyuluhan dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan penyuluhan di lapangan; 1 (satu) unit handycam untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan penyuluhan dalam bentuk rekaman yang dapat dipublikasikan untuk menjadi bahan penyuluhan; 1 (satu) unit telepon dan mesin faksimile untuk melakukan komunikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas penyuluhan. 1 (satu) unit *Mobile Phone* apabila tidak ada jalur kabel telepon. Alat bantu penyuluhan minimal yang harus tersedia di Balai Penyuluhan terdiri dari masing-masing 1 (satu) unit *overhead projector/LCD* untuk membantu para penyuluh dalam menyampaikan materi pada proses belajar di Balai Penyuluhan dan di tempat pelaksanaan penyuluhan lainnya; 1 (satu) unit perangkat pengeras suara (*wireless/megaphone/mic*) untuk membantu penyuluh dalam memperjelas penyampaian materi kepada pelaku utama dan pelaku usaha baik di Balai Penyuluhan maupun di tempat lain; 1 (satu) unit perangkat monitor televisi, dan VCD/DVD untuk membantu para penyuluh dalam menyajikan materi secara visual/nyata

dalam kelompok belajar skala kecil; 1 (satu) unit *tape recorder* untuk merekam hasil-hasil wawancara sebagai bahan penyusunan informasi dan materi dalam kegiatan penyuluhan; 1 (satu) unit *whiteboard/panelboard* untuk membantu kegiatan-kegiatan penyuluh dalam penyampaian

materi dan diskusi/rapat-rapat baik di dalam maupun di luar Balai Penyuluhan. Sarana ini sangat membantu terutama bagi balai-balai yang belum mempunyai fasilitas listrik. Hasil penelitian tentang fasilitasi perangkat pendukung penyuluhan disajikan seperti tabel 6.

Tabel 6 Fasilitasi perangkat pendukung penyuluhan di BPP Banguntapan

Falisitasi	Selalu	Kadang-kadang	Tidak pernah
Unit komputer	8	0	0
Papan display informasi	5	3	0
Kamera	5	2	1
Handy camp.	5	3	0
OHP	6	2	0
Pengeras suara	6	2	0
Tape recorder	4	4	0
White board	4	2	2
Soil tester	1	0	7
Perangkat uji tanah sawah	3	2	3
GPS	0	0	8
Falisitasi	Selalu	Kadang-kadang	Tidak pernah
Bagan warna daun	0	3	5
L U P	0	0	8
Rool meter	0	0	8
Pisau okulasi	0	0	8
Gunting pangkas	0	0	8
Alat pengukur kadar air	0	0	8
Alat ubinan	0	1	7
Alat pengukur salinitas	0	0	8
Pepustakaan	0	7	1
Ruangan macam-macam/serbaguna	2	5	1
Ruangan administrasi, tamu, dll	2	5	1
Ruangan pertemuan	2	4	2
Lahan uji coba minimal 1 ha	0	2	6
Jumlah	53	47	92
Total	180	151	93
Persentase	42,45	35,61	21,93

Sumber: Analisis data primer BPP Banguntapan

Fasilitas yang berupa perangkat keras di BPP Banguntapan termasuk katagori selalu ada sebesar 42,45%, kadang-kadang ada sebesar 35,61% dan tidak pernah ada 21,93%. Dari data tersebut perlu mendapat perhatian khususnya perangkat yang tidak ada, padahal dibutuhkan oleh penyuluh. Adanya perangkat computer 100% tersedia adalah milik pribadi yang dipakai untuk kepentingan BPP Banguntapan. Hal ini menunjukkan betapa besarnya motivasi penyuluh untuk mencukupi kebutuhan BPP. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa untuk sarana yang dimiliki penyuluh dan dibutuhkan oleh BPP Banguntapan, mereka sepakat untuk dipergunakan BPP. Hal ini dilakukan karena bila menunggu kiriman dari instansi terkait akan sulit terpenuhi.

Salah satu wujud kegiatan penyuluhan pertanian yang sangat perlu dilakukan oleh BP Model adalah memfasilitasi para petani agar dapat mengenali potensi wilayah (desa) masing-masing. Metode pengenalan potensi wilayah (desa) ini dapat dilakukan dengan menggunakan PRA (Participatory Rural Apraisal), yaitu suatu cara atau teknik pelibatan masyarakat untuk turut serta dalam proses mengamati dan mengkaji wilayahnya sendiri agar mereka mampu membuat rencana dan tindakan pembaharuan yang lebih baik sesuai dengan kondisi wilayahnya. Melalui PRA petani diharapkan dapat berdaya, mampu menganalisis keadaannya sendiri dan memikirkan apa yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki keadaannya, mengembangkan potensi yang dimilikinya, ketrampilan dan perilaku masyarakatnya dapat lebih mandiri. Selain itu petani juga belajar bersama berbagai pengetahuan

dan pengalaman melalui serangkaian kegiatan. Petani diasah untuk semakin pintar dan cermat mengkaji wilayahnya dan mengembangkan berbagai kegiatan yang tepat untuk memperbaiki dan meningkatkan keadaan mereka sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan adanya suatu bentuk kegiatan penyuluhan dalam bentuk pelatihan bagi petani untuk meningkatkan kemampuan petani dalam menganalisis potensi wilayah (desa) masing-masing. Suatu kemampuan yang sangat bermanfaat bagi petani dalam memberdayakan mereka untuk meningkatkan taraf hidup melalui usahatani. Pelatihan tersebut adalah sebagai perintis dan perangsang untuk kemudian ditindaklanjuti di lapangan.

KESIMPULAN

- a. Programma merupakan pedoman yang disusun setiap tahun sebagai acuan dalam kegiatan penyuluhan selalu disusun oleh BPP Banguntapan.
- b. Fasilitasi penyuluhan pertanian sudah memadai, dengan kondisi yang terbatas
- c. Ketersediaan informasi secara umum di BPP termasuk baik hal ini menggambarkan di BPP sudah memadai ketersediaan informasi bagi pengguna sehingga menimbulkan motivasi petani bila memerlukan informasi kepada BPP sebagai salah satu sumbernya
- d. Penguatan kelembagaan petani di BPP Banguntapan selalu dilakukan dan belum lengkapnya dukungan sarana untuk mendapatkan data utama yang akan memberikan kelengkapan data di BPP.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengembangan SDM Pertanian, 2009, Modul Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi Penyuluh Pertanian, Jakarta: Deptan.
- Badan Pusat Statistik. Kabupaten Bantul Dalam Angka 2010. Kartisapoetra, A.G 1994. Teknologi Penyuluhan Pertanian. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara
- Karyono, F. 1984, Proyek Pembangunan Ekonomi Pedesaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mardikanto, T. 1993. Penyuluhan Pembangunan Pertanian. Surakarta: UNS Press.
- Musnamar, E.I. 2003. Pembuatan dan Aplikasi Pupuk Organik Padat. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Prodjosuharjo, M. 1979, Ilmu Penyuluhan Pertanian, Departemen Ekonomi Pertanian Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Slamet M. 1978. Kumpulan Bacaan Penyuluhan Pertanian. Bogor: IPB
- Vanden ban, A.W dan Hawkins, HS. 1999. Penyuluh Pertanian. Yogyakarta: Kanisius.
-